

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis secara normatif terhadap kerangka hukum internasional dan nasional serta praktik yang diterapkan oleh perusahaan melalui studi kasus secara empiris yang didukung dengan wawancara dengan pihak perusahaan, bab ini memberikan gambaran dan pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana mekanisme *whistleblower* berfungsi sebagai instrumen pencegahan, penanganan, dan pendeteksi potensi pelanggaran HAM yang ditimbulkan dari praktik bisnis perusahaan. Oleh karena itu, didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang telah dipaparkan.

Pertama, mekanisme *whistleblower* dalam konteks hukum internasional dan praktik korporasi modern pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme pengaduan di tingkat operasional (*operational-level grievance mechanism*). Pada praktiknya mekanisme ini berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani pelanggaran HAM yang memungkinkan timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Jika ditinjau secara normatif, UNGPs memang tidak mengatur *whistleblower mechanism* secara langsung, melainkan mengatur tentang *grievance mechanism*. Namun, substansi dari prinsip-prinsip tersebut, khususnya prinsip 29 dan 31, memberikan arahan serta landasan normatif bagi perusahaan dalam

membangun sistem pelaporan yang efektif, aman, dan memberikan kemudahan akses kepada karyawan maupun pemangku kepentingan lain yang melapor.

Kedua, penerapan HRDD oleh perusahaan yang diteliti sangat berkaitan dengan mekanisme *whistleblower* sebagai salah satu instrumen pendukungnya. Pada praktiknya, HRDD tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi dan pencegahan risiko pelanggaran HAM perusahaan, namun juga mengandung unsur kemanan dan kemudahan akses fasilitas pelaporan serta jaminan kerahasiaan dan perlindungan dari segala bentuk pembalasan bagi para pelapornya. Selain itu, mekanisme ini juga berfungsi sebagai alat pendeteksi dini agar dugaan pelanggaran dapat segera diproses sejak awal untuk mencegah timbulnya masalah yang lebih besar. Dalam konteks ini, mekanisme *whistleblower*. Kehadiran mekanisme ini juga merupakan wujud nyata dari tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, sebagaimana yang ditegaskan dalam UNGPs dan berbagai regulasi internasional maupun nasional lainnya mengenai bisnis dan HAM.

Di Indonesia, regulasi hukum mengenai HRDD serta komponen-komponennya belum diatur secara mengikat dan independen, walaupun secara substansi sudah diatur lebih spesifik melalui Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Stranas BHAM. Namun, dalam praktik dan penegakannya masih sangat bergantung pada komitmen perusahaan serta pengaruh standar internasional yang bersifat *soft-law*. Dengan demikian, UNGPs dan beberapa regulasi internasional lainnya, khususnya yang disebutkan dalam kebijakan HAM perusahaan masih menjadi rujukan normatif dalam pembentukan kebijakan dan praktik perusahaan.

Secara garis besar dapat peneliti simpulkan bahwa mekanisme *whistleblower* merupakan komponen yang penting bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya di bidang HAM. Implementasi mekanisme tersebut dalam perusahaan multinasional sektor *pulp* dan kertas sebagai komponen HRDD tidak hanya menjadi bukti kepatuhan perusahaan terhadap standar internasional, namun juga berkontribusi pada pencegahan pelanggaran HAM yang berimplikasi pada keberlanjutan kegiatan usaha.

B. Saran

Atas studi kasus mengenai pelanggaran HAM yang timbul akibat aktivitas bisnis korporasi di perusahaan *pulp* dan kertas ini, serta penanggulangannya dengan HRDD melalui mekanisme *whistleblower*, peneliti merumuskan beberapa saran, diantaranya yaitu:

1. Bagi Perusahaan

- a. Membangun program sosialisasi atau penyuluhan mengenai mekanisme *whistleblower* bagi pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara periodik, khususnya bagi karyawan dan kontraktor. Tujuannya agar para pemangku kepentingan tersebut dapat mengenali dan memahami fungsi atau peran mekanisme ini dan bentuk tindakan apa saja yang dapat dilaporkan kepada perusahaan melalui aplikasi ini. Program ini diharapkan juga mampu meyakinkan karyawan dan kontraktor sebagai pemangku kepentingan terkait jaminan perlindungan pelapor atas pembalasan (*retaliation*), sehingga para pemangku kepentingan dapat melapor dengan aman. Dengan

demikian mekanisme ini dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

- b. Membentuk unit atau komite yang secara khusus berperan untuk meninjau (*reviewing*) segala bentuk kebijakan yang akan diusulkan untuk memastikan kesesuaian kualitas kebijakan dengan standar nasional dan internasional, serta nilai-nilai perusahaan. Komite ini juga berperan dalam mengevaluasi dan mengawasi secara berkala mengenai relevansi kebijakan tersebut terhadap perkembangan-perkembangan standar nasional maupun nasional serta isu-isu yang berkaitan dengan HAM secara global melalui pembelajaran dari implementasi (*continuous improvement*). Fungsi pengawasan dalam komite ini secara khusus juga berperan untuk mengawasi secara langsung implementasi kebijakan-kebijakan perusahaan agar benar-benar ditegakkan atau diimplementasikan.
- c. Meningkatkan jaminan *whistleblower protection* secara lebih komprehensif dengan memperjelas kebijakan anti-retaliasi (*non-retaliation*), termasuk memperkuat langkah normatif dengan melakukan penerapan sanksi bagi pihak yang membalas dendam, serta memperkuat prosedur perlindungan bagi pelapor dan keluarganya. Hal ini penting, agar *whistleblower* tidak takut dalam melaporkan pelanggaran HAM dalam lingkup perusahaan, sehingga menciptakan lingkungan perusahaan yang aman dan nyaman bagi para pemegang kepentingan, karyawan, dan masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Indonesia:

- a. Menurut penulis, pemerintah Indonesia perlu merancang regulasi secara *lex specialis* mengenai HRDD, terutama mekanisme *whistleblower* dalam konteks bisnis dan HAM, sehingga perusahaan memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang jelas terhadap HAM, serta dapat membantu negara untuk menciptakan langkah-langkah yang kontributif dalam upaya mencegah pelanggaran HAM melalui mekanisme *whistleblower*.
- b. Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan pengawasan terkait HRDD dan penerapan *whistleblowing system* terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dengan memberikan mandat yang jelas kepada Komnas HAM dan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengawasi pelaksanaan dan konsistensi implementasinya dalam perusahaan.
- c. Menyediakan fasilitas advokasi berupa LSM yang dapat berperan aktif dalam memantau efektivitas implementasi HRDD di lapangan dan menyediakan pendampingan terhadap pelapor.

Dengan saran-saran demikian, skripsi ini tidak hanya memberikan kontribusi secara akademik, namun diharapkan juga dapat menawarkan rekomendasi praktis bagi dunia hukum, perusahaan, dan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Hal ini memperkuat posisi *whistleblowing system* sebagai bentuk perwujudan komponen dari HRDD yang mendukung kewajiban perusahaan multinasional atas akuntabilitas dan penghormatannya terhadap HAM dalam praktis bisnisnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrew Clapham, 2019, *Human Rights Obligations For Non-State Actors: Where Are We Now?*, Cambridge University Press, United kingdom.
- Business and Human Rights Initiative, 2010, *How to Do Business with Respect for Human Rights: A Guidance Tool for Companies*, Global Compact Network Netherlands, The Hague.
- Dawn Watkins dan Mandy Burton, 2018, *Research Methods in Law*, Routledge, New York.
- Edwin Koster, Jane Hwang, dan Craig Moss, 2012, *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: A Six-Step Approach to Supply Chain Implementation*, Social Accountability International, New York.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum.*, Cetakan 1, Refika Aditama, Bandung.
- Gary Gereffi dan Karina Fernandez-Stark, 2012, *Global Value Chain Analysis: A Primer*, Edisi Kedua, Center on Globalization, Governance, and Competitiveness at the Social Research Institute, Duke.
- Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Ian Binnie, John O'Meally, dkk, 2019, *Effective Operational-Level Grievence Mechanisms*, International Commission of Jurist, Switzerland.
- John G. Ruggie, 2012, *State of Play: The Corporate Responsibility to Respect Human Rights in Business Relationships*, Institute for Human Rights and Business, Global Business Initiative on Human Rights, London, hlm 68.
- John Gerard Ruggie, 2013, *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*, W.W. Norton and Company, New York, USA.
- Marie Terracol, 2018, *A Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation*, Transparency International, Jerman.
- Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta.
- M. Syafi'ie dan Nova Umiyati, 2012, *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.
- Peter Muchlinski, 2021, *The Impact of the UN Guiding Principles on Business Attitudes to Observing Human Rights*, Business and Human Rights Journal, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Philip Alston dan Ryan Goodman, 2013, *International Human Rights: The Successor to International Human Rights in Context*, Oxford University Press, Oxford.

- R. Edward Freeman dan John Mc Vea, 2015, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Cambridge University Press.
- Robert McCorquodale, dkk, 2017, *Human Rights Due Diligence in Law and Practices: Good Practices and Challenge for Business Enterprises*, Business and Human Rights Journal, Vol 2, Cambridge University Press.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, Alfabeta, Bandung.
- Subhan Purwadinata & Ridolof Wenand Batilmurik, 2020, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Cetakan 1, Literasi Nusantara, Malang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Wesley Cragg, 2012, *Business and Human Rights: A Principle and Value-based Analysis*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom.

Skripsi

- Brigitta Raras Ayu Roesedi, 2018, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Setempat Oleh Perusahaan Transnasional di Indonesia (Studi Kasus PT. Freeport Indonesia)*, Fakultas Hukum, Universitas Atma jaya Yogyakarta.
- Hafsah Aryandini, 2023, *Urgensitas Penerapan Konsep Human Rights Due Diligence Pada Sektor Pertambangan di Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Juwita Mardania, 2024, *Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Usaha di Kota Pekanbaru oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jurnal

- Arslonova Robiya, 2025, *UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Theoretical and Legal Basis*, Vol. 50, World Buletin of Management and Law (WBML).
- BAXI, U., 2016, *Human Rights Responsibility of Multinational Corporations, Political Ecology of Injustice: Learning from Bhopal Thirty Plus?*, Business and Human Rights Journal.
- Bettina Berendt dan Stefan Schiffner, 2022, *Whistleblower Protection in The Digital Age - Why "Anonymous" is Not Enough. From Technology to A Wider View of Governance*, International Review of Information Ethics, Vol. 31.
- Bryan H. Druzin, 2016, *Why Does Soft Law have any Power Anyway?*, Asian Journal of International Law.

- Claire Methven O'Brien, 2023, *From Soft Law To Hard Law In Business and Human Rights*, Leiden Journal of International Law.
- Fahrurrozi Muhammad, 2024, *The Intersection Between Investment and Human Rights: Business and Human Rights National Strategy and The Business Ready Program in Indonesia*, Indonesian Law Journal, Vol. 17 No. 2.
- Giuliani, E., Santangelo, G. D., & Wettstein, F, 2016, "Introduction to Human Rights and International Business Research: A Call for Studying Emerging Market Multinationals", *Management and Organization Review*, Vol 12.
- Grenata Petra Claudia Hutagulung, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Upaya Penegakan Hukum Pajak di Indonesia*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta.
- Hiroshi Tanaka, Marco Bianchi, dan Zola Makatini, 2025 *Corporate Accountability in Human Rights Violations: Legal Obligations Under International and Domestic Law*, *Journal of America*, Vol 1, American Journal of Law and Human Rights.
- Hyejoon Im and John McLaren, 2023, *Global Value Chains and Labor Standards: The Race-To-The-Bottom Proble*, National Bureau of Economic Research, Cambridge,
- James Harrison, 2010, *Measuring Human Rights: Reflections on the Practice of Human Rights Impact Assessment and Lessons for the Future*, Legal Studies Research Paper, University of Warwick School of Law.
- John Gerard Ruggie, 2007, *Business and Human Rights: The evolving International Agenda*, Corporate Social Responsibility Initiative, Working Paper No. 31, Harvard University.
- John Gerard Ruggie dan John F. Sherman, III, 2017, The Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Rely to Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale, *The European Journal of International Law*, Vol. 28 No. 3, Oxford University.
- Jonathan Bonnitcha dan Robert McCorquodale, 2017, *The Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, The European Journal of International Law, Vol. 28, No. 3, Oxford University Press.
- Mariëtte van Huijstee, Victor Ricco, dan Laura Ceresna-Chaturvedi, 2012, *How to Use the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in Company Research and Advocacy: A Guide for Civil Society Organizations*. SOMO/CEDHA Cividep India.
- Michael Rogerson, Francesco Scarpa, Annie Snelson-Powell, 2024, *Accounting for Human Rights: Evidence of Due Diligence in EU-listed Firms' Reporting*, Elsevier, ScienceDirect.
- Muhammad Jailani, 2011, *Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*, Syiar Hukum, FH UNISBA.

- Mutiara Hikmah, 2005, Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Nadia Zahoor, Jie Wu, Huda Khan, Zaheer Khan, 2023, “De-globalization, International Trade Protectionism, and the Reconfigurations of Global Value Chains”, *Management International Review* 63, Springer.
- Ni Putu Krista Welda Lestari, Muh Risnain, Ayu Riska Amalia, 2025, Implementasi Perpres 60/2023 tentang Bisnis dan HAM di NTB Berdasarkan Prinsip UNGPs, *Mataram Journal of International Law*, Vol.3, Departemen Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram.
- Oliver De Schutter, 2007, *The Accountability of Multinationals for Human Rights Violations*, Vol. 29 No. 1, *Human Rights Quarterly*.
- Rehulina, 2022, *Prisma Application as a Measuring Instrument of Corporate Obligations to Respect Human Rights*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, No. 4, Vol 16, FH UNILA.
- Smit, L., Griffith, A., & McCorquodale, R, 2018, When national law conflicts with international human rights standards: Recommendations for business, Bingham Centre for the Rule of Law.
- S. Prakash Sethi, 2014, John Gerard Ruggie, Just Business: Multinational Corporations and Human Rights, *J Bus Ethics*, Springer.
- Stephen M. Kohn, Esq, dkk, 2024, *Why Whistleblowing Works: A New Look at the Economic Theory of Crime*, National Whistleblower Center, Northeastern University School of Law.
- Viljam Engström, 2002, *Who Is Responsible for Corporate Human Rights Violations?*, Abo Akademi University, Institute for Human Rights.
- FXB Centre for Health and Human Rights and Open Society Foundation, 2013, Health and Human Rights Resource Guide, Harvard School of Public Health, Harvard University.

Peraturan Hukum Primer Internasional

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Peraturan Hukum Primer Nasional

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Panduan Hukum Internasional (Rujukan Kebijakan HAM Perusahaan)

United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights (UNGPs)

United Nations Global Compact, 2021, *Implementing Effective Modern Slavery Grievance Mechanisms*, Global Compact Network, Australia.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Panduan Hukum Internasional

Business and Human Rights Initiative, 2010, *How to Do Business with Respect for Human Rights: A Guidance Tool for Companies*, Global Compact Network Netherlands, The Hague.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 'General Comment No 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health', UN Doc E/C.12/2000/4.

European Parliament, 2017, *Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, Policy Department, Directorate-General for External Policies, Belgium.

Human Rights Council, 2011, Report of the Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie, Seventeenth Session, A/HRC/17/31.

OECD *Committing to Effective Whistleblower Protection: Towards a Comprehensive Framework for Whistleblower Protection*.

OECD *Guidelines for Multinational Enterprises*

OECD *Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 2012, *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretative Guide*, United Nations, New York and Geneva.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2008, *Benchmark Definition of Foreign Direct Investment*, 4th Edition.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2016, *Committing to Effective Whistleblower Protection*.

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General comment No. 24 (2017) on State obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of business activities, E/C.12/GC/24.

United Nations Commission on Human Rights, 26 August 2003, *Norms on the Responsibility of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, UN Doc/E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2.

United Nations Centre for Human Rights, 1996, *The International Bill of Human Rights*, Human Rights Fact Sheet, United Nations.

United Nations Human Rights Council, 2011, *Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises: Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, A/HRC/17/31, New York dan Jenewa.

Komnas HAM dan ELSAM, 2017, *National Action Plan on Business and Human Rights*.

Panduan Hukum Nasional

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Internet

Agatha Olivia Victoria dan Guido Merung, 2024, Kemenkumham Sebut Hampir 300 Perusahaan Sudah Gunakan Aplikasi PRISMA, ANTARA News, <https://www.antaranews.com/berita/4020540/kemenkumham-sebut-hampir-300-perusahaan-sudah-gunakan-aplikasi-prisma>, diakses 2 Desember 2025.

Amnesty International, 2024, Kondisi Hak Asasi Manusia di Dunia: April 2024, hlm 24, <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/7200/2024/id/>, diakses 10 Desember 2025.

APRIL DIALOG, 2023, APRIL Group Response to Al Jazeera Article, <https://www.aprildialog.com/en/2023/04/18/april-group-response-to-al-jazeera-article/#:~:text=APRIL%20Group%20strictly%20adheres%20to,entities%20within%20the%20APRIL%20Group.>, diakses 14 Desember 2025.

APRIL, *Sustainability*, <https://www.aprilasia.com/en/sustainability/sustainability-report/#:~:text=Peningkatan%20produktivitas%20perkebunan%20yang%20berkelanjutan,untuk%20konservasi%20sejak%20tahun%202020>, diakses 14 Desember 2025.

APRIL, 2023, *Sustainability Report*, hlm 23, https://www.aprilasia.com/images/pdf_files/sr/aprilasia-sr-2023.pdf, diakses 14 Desember 2025.

APRIL Group. 2022. Kebijakan Hak Asasi Manusia. Pekanbaru: APRIL Group, <https://www.aprilasia.com>. Diakses 2 November 2025.

APRIL Group, 2019, Mengukur Efektivitas Mekanisme Pengaduan: Proyek 'Pertama Saya' untuk Sustainability Professional Development Programme di APRIL, Our Media: APRIL Asia, diakses 4 November 2025. <https://www.aprilasia.com/id/our-media/artikel/mengukur-efektivitas-mekanisme-pengaduan-proyek-pertama-saya-untuk-sustainability-professional-development-programme-di-april>, diakses 4 November 2025.

- Bintang W. Putra, 2022, *Human Rights Due Diligence (HRDD): Harapan Baru Penegakan HAM di Sektor Bisnis*, International NGO Forum on Indonesian Development, <https://infid.org/human-rights-due-diligence-hrdd-harapan-baru-penegakan-ham-di-sektor-bisnis/>, diakses 20 November 2025.
- Break the Chain of Labour Exploitation, *What is Labour Exploitation?*, <https://endlabourexploitation.co.uk/about/#:~:text=Eksplorasi%20tenaga%20kerja%20adalah%20penyalahgunaan,yang%20nyata%20atau%20lebi%20halus>, diakses 10 Desember 2025.
- Hindustan Unilever Limited, 2025, *Unilever Whistle Blower Policy*, <https://www.hul.co.in/files/hul-whistle-blower-policy.pdf>, diakses 7 Desember 2025.
- Human Rights Watch, 2003, *Without Remedy: Human Rights Abuse and Indonesia's Pulp and Paper Industry*, Vol. 15, HRW Report, <https://www.hrw.org/report/2003/01/06/without-remedy/human-rights-abuse-and-indonesias-pulp-and-paper-industry>, diakses 26 November 2025.
- Human Rights Watch, 2015, *"Work Faster or Get Out" Labor Rights Abuses in Cambodia's Garment Industry*, <https://www.hrw.org/report/2015/03/12/work-faster-or-get-out/labor-rights-abuses-cambodias-garment-industry>, diakses 10 Desember 2025.
- KBBI, Mekanisme, <https://kbbi.web.id/mekanisme>, diakses 25 Oktober 2025.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), 2024, *Catatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia di Indonesia*, [https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-\\$WSV79CZD.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-$WSV79CZD.pdf), diakses 25 September 2025.
- Labor Solutions, New HRDD Support: Case Management Added to Labor Line, Labor Solutions Global, Singapura, <https://www.laborsolutions.tech/post/new-hrdd-support-case-management-added-to-labor-line>, diakses 9 Oktober 2025.
- Robert G. Eccles, "World Benchmarking Alliance: The good, the bad, and the ugly." *Forbes*, 22 Februari 2020, <https://www.forbes.com/sites/bobeccles/2020/02/22/world-benchmarking-alliance-the-good-the-bad-and-the-ugly/>, diakses pada 21 September 2025.
- Saskia Wilks dan Johannes Blankenbach, 2021, *Beyond Social Auditing: Key Considerations for Mandating Effective Due Diligence*, hlm 3, https://media.business-humanrights.org/media/documents/2021_Beyond_social_auditing_v5.pdf, diakses 10 Desember 2025.
- SUN Meng dan FENG Tingting, 2021, *New Developments and Challenge in the UN Norms on Human Rights Responsibilities of Transnational Corporations*, China Society for Human Rights Studies, <https://en.humanrights.cn/2021/07/15/cd1b794ba9fd11ee87f90c42a1073f92.html>, diakses 20 November 2025.

Uli Arta Siagian, 2022, Expansion of *Pulp* and Paper Companies APP and APRIL in Indonesia: More Deforestation and Violence, World Rainforest Movement, <https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/expansion-of-pulp-and-paper-companies-app-and-april-in-indonesia-more-deforestation-and-violence>, diakses 25 November 2025.

Unilever Business Integrity Our Speak Up Platforms and Investigating Code Breaches, <https://www.unilever.com/files/b1224382-9c6c-4a5f-a6f3-aaa9e799562c/2022-our-speak-up-platforms--investigating-code-breaches-external.pdf>, diakses 7 Desember 2025.

United Nations Committee on Economic, 2017, Social and Cultural Rights (CESCR), General comment No. 24 (2017) on State obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of business activities, E/C.12/GC/24, <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/2017/en/122356>, diakses 10 December 2025.

World Benchmarking Alliance, 2024, Social Benchmark 2024 Insights Report, Amsterdam, <https://www.worldbenchmarkingalliance.org/publication/social/>, diakses pada 21 September 2025.